BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barito Kuala.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperhatikan dan mensinergikan selain dengan RPJM Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI, RPJM Provinsi Provinsi Kalimantan Selatan, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Program Nasional berdasarkan RKP tahun 2019 yang dilaksanakan baik oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala yaitu :

Urusan Wajib

1. Program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Urusan Pilihan

1. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
2. Program Pengembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019 yang telah mengakomodir usulan hasil Musrenbang dari tiap Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

1.3.2. Tujuan

Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, hubungan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS NAKERTRANS

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017, capaian Rencana Kerja tahun 2018 (tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian. Realisasi program / kegiatan tahun 2017 yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :

1. **Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja**

   Kegiatan ini ada 2 jenis yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Pelatihan Berbasis Kompetensi, untuk Kegiatan yang berbasis Masyarakat memiliki 3 Paket terdiri dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Las Listrik, Bidang Kejuruan Otomotif dan Bidang Kejuruan Menjahit, sedangkan Pelatihan Berbasis Kompetensi memiliki 2 Paket terdiri dari Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Las Listrik, Bidang Kejuruan Otomotif. Kegiatan ini ditujukan kepada pencari kerja dari kelompok penganggur lulusan SLTA, Perguruan Tinggi dan Masyarakat agar siap pakai dalam memasuki dunia kerja melalui pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja. Kegiatan yang diselenggarakan adalah Pelatihan Otomotif Sepeda Motor, Las Listrik dan Pelatihan Menjahit. Hasil (*Outcome*) dari kegiatan ini adalah Terlatihnya Pencari Kerja yang memiliki Kompetensi Otomotif Sepeda Motor, Las Listrik dan Menjahit. Realisasi kegiatan ini yaitu 99,34% jika dikonversi ke standar nilai maka pengguna anggaran dikategorikan *sangat baik* dan realisasi capaian target fisik 80 orang (5 paket) pencari kerja terampil (100%).

2. **Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan**
   Mengarahkan dan memberi kesempatan kepada masyarakat pencari kerja untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk berusaha, baik untuk berwirausaha, meningkatkan motivasi usaha dan kerja maupun untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya agar produktivitasnya meningkat. Keluaran *(Output)* kegiatan ini adalah Terlaksananya pelatihan Jamur Tiram. Hasil *(Outcome)* Tersedianya tenaga kerja terampil dan siap pakai. Realisasi capaian target fisik adalah terlaksananya 1 paket pelatihan (20 orang) atau (100%). Jika dihubungkan antara peningkatan jumlah pengangguran dan rendahnya tingkat kualitas dan produktivitas kerja, maka kegiatan ini sangat dibutuhkan dan perlu pelatihan yang variatif sesuai kebutuhan pasar, sehingga tersedia wirausaha / pencari kerja yang terampil.

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN BARITO KUALA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Lembar : 1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
								Target Kinerja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja									
2.01.	01.			**Bidang Urusan Ketenagakerjaan**									
2.01.	01.	01.		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlayaninya Administrasi Perkantoran**								
2.01.	01.	01.	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik	72 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	36 Bln	50
2.01.	01.	01.	02	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya ATK, barang cetakan dan penggandaan	18 Jenis, 312 Jenis	3 Jenis, 52 Jenis	3 Jenis, 52 Jenis	3 Jenis, 52 Jenis	100	3 Jenis, 52 Jenis	9 Jenis, 156 Jenis	50

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	01.	03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	SKH 1.584 Eks	SKH 264 Eks	SKH 264 Eks	SKH 264 Eks	100	SKH 264 Eks	SKH 792 Eks	50
2.01.	01.	01.	04	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan Jamuan Makan Minum Rapat	307 Orang	63 Orang	44 Orang	44 Orang	100	44 Orang	151 Orang	49,18
2.01.	01.	01.	08	Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi/Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi/kunjungan ke dalam dan keluar daerah	347 Kali Dalam Daerah, 1.229 Kali Luar Daerah	228 Kali Luar Daerah	62 Kali Dalam Daerah, 171 Kali Luar Daerah	62 Kali Dalam Daerah, 171 Kali Luar Daerah	100	70 Kali Dalam Daerah, 200 Kali Luar Daerah	132 Kali Dalam Daerah, 599 Kali Luar Daerah	48,74
2.01.	01.	02.		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana**								
2.01.	01.	02.	10	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	33 Jenis, 381 Unit	3 Jenis, 87 Unit	3 Jenis, 50 Unit	3 Jenis, 50 Unit	100	7 Jenis, 76 Unit	13 Jenis, 213 Unit	55,90
2.01.	01.	02.	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu	8 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100	1 Gedung	4 Gedung	50
2.01.	01.	02.	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/ Mobil Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Disnakertrans	6 Unit R4 & 108 Unit R2	1 Unit R4 & 18 Unit R2	1Unit R4 18 Unit R2	1 Unit R4 & 18 Unit R2	100	1 Unit R4 & 18 Unit R2	3 Unit R4 & 54 Unit R2	50

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	02.	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharan Komputer dan AC, Printer, Laptop, mesin tik, wireless simda keu. pada Disnakertrans	60 Unit Komputer 72 Unit AC, 48 bh Laptop, 60 bh Printer, 18 bh mesin tik 6 Bh Wireles Simda	10 Unit Komputer, 12 Unit AC, 8 bh Laptop, 10 bh Printer, 3 bh mesin tik 1 Bh Wireles Simda	10 Unit Komputer 12 Unit AC, 8 bh Laptop, 10 bh Printer, 3 bh mesin tik 1 Bh Wireles Simda	10 Unit Komputer 12 Unit AC, 8 bh Laptop, 10 bh Printer, 3 bh mesin tik 1 Bh Wireles Simda	100	10 Unit Komputer 12 Unit AC, 8 bh Laptop, 10 bh Printer, 3 bh mesin tik 1 Bh Wireles Simda	30 Unit Komputer 36 Unit AC, 24 bh Laptop, 30 bh Printer, 9 bh mesin tik 3 Bh Wireles Simda	50
2.01.	01.	05.		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan/ Laporan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi**								
2.01.	01.	05.	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja LKPJ, Renstra, Renja, LPPD, Lakip, Tapkin, Evaluasi Renja	42 Jenis Laporan	7 jenis Laporan	7 jenis Laporan	7 jenis Laporan	100	7 jenis Laporan	21 jenis Laporan	50
2.01.	01.	05.	02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18 Jenis Laporan	4 jenis Laporan	3 jenis Laporan	3 jenis Laporan	100	3 jenis Laporan	10 jenis Laporan	55,55
2.01.	01.	10.		**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang DitempatKan**								
2.01.	01.	10.	02	Penyuluhan Calon TKI	Meningkatnya Pemahaman TKI dan Tertanganinya laporan kasus TKI	230 Peserta	30 Peserta	40 Peserta	40 Peserta	100	40 Peserta	110 Peserta	47,83

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	10.	03	Job Fair	Terfasilitasinya dan tersalurkannya sebagian Pencari Kerja	90 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100	15 Orang	45 Orang	50
2.01.	01.	10.	04	Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja (AKL, AKAD dan AKAN)	Tersebarluasnya informasi prosedur penempatan tenaga kerja	800 Peserta	300 Peserta	100 Peser-ta	100 Peserta	100	250 Peserta	650 Peserta	81,25
2.01.	01.	10.	05	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Terbinanya LPK	20 LPK	-	5 LPK	5 LPK	100	10 LPK	10 LPK	22,22
2.01.	01.	11.		**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Calon Tenaga Kerja**								
2.01.	01.	11.	06	Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Otomotif	Terlatihnya Pencari Kerja yang memiliki kompetensi Kerja Bidang Kejuruan Otomotif	304 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	48 Orang	15,79
2.01.	01.	11.	01	Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Las Listrik	Terlatihnya Pencari Kerja yang memiliki kompetensi Kerja Bidang Kejuruan Las Listrik	208 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	48 Orang	23,08
2.01.	01.	11.	03	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Las Listrik	Terlatihnya Masyarakat / Pencari Kerja yang memiliki kompetensi Las Listrik	160 Orang	-	20 Orang	20 Orang	100	40 Orang	60 Orang	37,50
2.01.	01.	11.	04	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Otomotif	Terlatihnya Masyarakat / Pencari Kerja yang memiliki kompetensi Otomotif	208 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	48 Orang	23,08

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	11.	05	Pelatihan Berbasis Masyarakat bagi Pencari Kerja Bidang Kejuruan Menjahit	Terlatihnya Pencari Kerja yang memiliki Masyarakat Kerja Bidang Kejuruan Menjahit	320 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	48 Orang	15
2.01.	01.	12.		**Program Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**Prosentase Kasus Perselisihan HI yang Diselesaikan dgn Mediasi**								
2.01.	01.	12.	01	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya Mediasi : 1. Klarifikasi 2. Risalah 3. Anjuran	120 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	100	10 Kasus	40 Kasus	33,33
2.01.	01.	12.	02	Pembinaan, Pembentukan dan Pembuatan PK, PP, PKB dan LKS Bipartit	Terlaksananya Kesepakatan Kerja	24 Macam Dokumen	4 Macam Dokumen	4 Macam Dokumen	4 Macam Dokumen	100	4 Macam Dokumen	12 Macam Dokumen	50
2.01.	01.	13.		**Program Pengembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi**	**Jumlah Calon Kewirausahawan Baru Yang Terlatih**								
2.01.	01.	13.	01	Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan Kewirausahaan	120 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	60 Orang	50
2.01.	01.	14.		**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**	**Jumlah Transmigran yang ditempatkan**								
2.01.	01.	14.	01	Penyediaan dan pengelolaan prasarana sarana sosial dan ekonomi di kawasan Transmigrasi	Terlaksananya pembuatan sarana air bersih dan pembangunan / peningkatan jalan Non Status DAK Afirmasi	15 Buah 7,5 Km	3 Buah 1,5 Km	3 Buah 1,5 Km	3 Buah 1,5 Km	100	3 Buah 1,5 Km	9 Buah 4,5 Km	60
2.01.	01.	15.		**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan**								
2.01.	01.	15.	01	Sosialisasi SK. Gubernur UMP	Terselenggaranya Sosialisasi UMP	6 Dokumen SK UMK	1 Dokumen SK UMP	1 Dokumen SK UMP	1 Dokumen SK UMP	100	1 Dokumen SK UMP	3 Dokumen SK UMP	50

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01.	01.	15.	03	Pembinaan Perusahaan dan Pekerja	Terselenggaranya pembinaan pekerja	250 Perusahaan	-	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100	29 Perusahaan	79 Perusahaan	31,60
2.01.	01.	15.	05	Pembinaan Kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	Terlaksananya pembinaan kepesertaan BPJS	220 Orang	-	-	-	-	29 Perusahaan	29 Perusahaan	13,18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

a. Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenaga-kerjaan, maka penyusunan capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan. Target Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2017. Lima pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- Pelayanan Pelatihan Kerja, indikator SPM : besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, target tahun 2017 adalah 75%; besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, target tahun 2017 adalah 60%; besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, target tahun 2017 adalah 60%.
- Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, indikator SPM : besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, target tahun 2017 adalah mencapai 70%.
- Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, indikator SPM adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan Madiasi, target sampai tahun 2017 adalah 25%
- Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, indikator SPM : besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, target tahun 2017 adalah mencapai 45%.

Perlu disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, dirubah dengan Permenakertrans Nomor 2 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tentang Ketenagakerjaan.

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Permendagri Nomor 73 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian ditetapkan 2 (dua), yaitu :

Urusan Ketenagakerjaan :

1. Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja / buruh, capaian kinerja 45,16% dengan rumusan perbandingan Jumlah pekerja / buruh peserta program jamsostek aktif dengan Jumlah pekerja / buruh dikali 100%.
2. Pencari Kerja yang Ditempatkan, capaian kinerja sebesar 56,12% dengan rumusan jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dengan jumlah Pencari Kerja yang mendaftar dikali 100%.

Urusan Ketransmigrasian :

1. Transmigrasi Swakarsa capaian kinerja 0% dengan rumusan jumlah Transmigran Swakarsa dibanding dengan jumlah Transmigran dikali 100.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barito Kuala

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain :

1. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
2. Tingginya jumlah pengganggguran;
3. Rendahnya tingkat pendidikan;
4. Minimnya perlindungan hukum;
5. Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi;
6. Penganggur atau Pencari Kerja kurang memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala, diantaranya adalah : terbatasnya tenaga fungsional pengantar kerja dan mediator, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, masih terdapat anak dibawah umur yang bekerja, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja. Rendahnya motivasi tenaga kerja Kabupaten Barito Kuala untuk bekerja di luar Kabupaten Barito Kuala.

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah : Angka kemiskinan cenderung tinggi (Kab. Batola 5,37%, Prov Kalsel 4,27%), Produktivitas tenaga kerja rendah Fenomena Negara berkembang, Daya saing relatif rendah, disebabkan rendahnya mutu SDM, dipengaruhi tingkat Pendidikan dan kompetensi kerja, Hubungan Industrial (pengusaha, pekerja dan pemerintah), Persoalan pengupahan, Penghapusan outsourcing, Putusnya mata rantai pengawasan ketenagakerjaan, Belum otimalnya perluasan kepesertaan, pelayanan dan manfaat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) khusus BPJS ketenagakerjaan, Permasalahan ketransmigrasian diantaranya adalah Semakin terbatasnya ketersediaan lahan *clear and clean*, Masih adanya sisa beban tugas sertifikat kepemilikan lahan, Sengketa lahan transmigrasi dengan pihak lain, Belum optimal dukungan pemangku kepentingan dan sinergi program dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, Keberpihakan kebijakan dalam pengalokasian anggaran program transmigrasi, Belum optimalnya data untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, sejalan dengan otonomi daerah dan desentralisasi serta restrukturisasi SKPD yang membidangi transmigrasi pemerintah provinsi.

b. Isu Strategis

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barito Kuala disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dirumuskan sbb :

Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut :

1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
4. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;
5. Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.

Cakupan masalah yang luas :

1. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif;
2. Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal Kabupaten Indramayu;
3. Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan;
4. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu.

Permasalahan menurut *stakeholders* :

1) Sektor ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi relatif belum didayagunakan secara maksimal;
2) Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum maksimal;
3) Tingginya tingkat migrasi dan jumlah pendatang yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Barito Kuala lulus sekolah tidak kembali ke daerahnya;
4) Kurang *link and match*-nya antara lulusan pendidikan formal dengan dunia kerja;

5) Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi pada pekerja tidak tetap/*outsourching*, berpotensi pada terjadinya pekerja kembali menjadi penganggur;
7) Kasus perselisihan hubungan industrial yang madiasi.

Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, didukung dengan upaya pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isu isu strategis, maka perlu ditindaklanjuti dengan suatu rencana tindak berupa program dan kegiatan yang nyata, didukung dengan penyiapan landasan- landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan, disusunlah program-program sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
5. Pengembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2019 disusun telah berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Sehingga tidak ada perubahan dalam Program Kegiatan maupun besaran anggaran. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja terdiri dari 3 Program dan 13 Kegiatan, Urusan Pilihan Ketransmigrasian terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan. Serta 4 Program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (*a-spatial*). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap Tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barito Kuala.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memiliki tugas pokok dan fungsi strategis dalam kerangka pencapaian Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yaitu : ***" Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera "*** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada misi ke 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga).
dengan sasaran

- Misi 1 Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.
- Misi 2 Meningkatkan budidaya dan diversifikasi usaha sector pertanian.
- Misi 3 Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat.

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transnigrasi Kabupaten Barito Kuala dalam sasaran ini adalah untuk meningkatkan infrastruktur Kawasan Transmigrasi dan Mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal, Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

Tujuan :

a. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas baik manajemen maupun adminitrasi yang *akuntabel* dalam fasilitasi dan pelayanan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;

b. Pembangunan *sinergitas* kebijakan, rencana program, pelaksanaan dan pengendalian antar unit kerja dan dengan satuan kerja / lembaga / sektor terkait untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah ;

c. Peningkatan pelayanan, sarana informasi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang transparan, cepat, akurat dan akuntabel untuk menyediakan informasi dan pelayanan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja bagi pencari kerja ;

d. Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meningkatkan kualitas dan terwujudnya kemandirian manajemen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi ;

e. Penciptaan ketenangan bekerja dan berusaha serta terwujudnya pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, professional ;

f. Pelaksanaan pengembangan wilayah transmigrasi, transmigrasi regional dan transmigrasi lokal untuk menciptakan ketahanan nasional dan menciptakan keunggulan potensi lokal, guna meningkatkan daya saing lokal serta kesejahteraan masyarakat dan transmigran.

Sasaran :

a. Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas baik manajemen maupun administrasi yang *akuntabel* dalam fasilitasi dan pelayanan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;

b. Terciptanya *sinergitas* kebijakan, rencama program, pelaksanaan dan pengendalian antar unit kerja dan dengan satuan kerja / lembaga / sektor terkait untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah ;

c. Tersedianya sarana informasi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang transparan, cepat, akurat, dan *akuntabel* untuk menyediakan informasi kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja bagi pencari kerja ;

d. Tersedianya kualitas dan produktivitas SDM dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meningkatkan kualitas dan terwujudnya kemandirian manajemen penyelenggaran pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan transmmigrasi ;

e. Terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha serta terwujudnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, profesional ;

f. Terwujudnya pelaksanaan pengembangan wilayah transmigrasi, transmigrasi regional dan transmigrasi lokal untuk menciptakan ketahanan nasional dan menciptakan keunggulan potensi lokal guna meningkatkan daya saing lokal serta kesejahteraan dan kerukunan masyarakat dan transmigran.

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan memperhatikan Visi, Misi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi Kesatu : Mengintegrasikan infrastruktur wilayah yang mendukung kemandirian desa dan penataan kota	Meningkatkan infrastruktur kawasan transmigrasi	Meningkatnya Pengembangan kawasan transmigrasi
Misi Kedua : Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui inovasi teknologi berbasis pertanian	Mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi
Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas ketakwaan, kecerdasan, kesehatan dan profesionalitas SDM	Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan	Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya kesejahteraan pekerja
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis

3.3. Program dan Kegiatan

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, yang diimplementasikan dalam sasaran program, yaitu : Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan target kinerja adalah rasio tenaga kerja terampil dan produktif; Meningkatnya kesempatan kerja dengan target kinerja adalah persentasi penempatan terhadap pencari kerja terdaftar; Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan target kinerja rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial; serta Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan target kinerja adalah jumlah Jalan yang di bangun, peningkatan dan pembangunan prasarana sarana di kawasan Transmigrasi dan Program Pemgembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi target kinerja peningkatan sumber daya warga transmigrasi mengembangkan wirausaha produktif. Target kinerja ini merupakan dasar pertimbangan disusunnya Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Urusan Ketenagakerjaan acuan kinerjanya tercantum dalam Misi 3, Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala menetapkan program-program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang.

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala adalah :

“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Kompeten, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Rukun”.

Pernyataan Misi yang selanjutnya dituangkan dalam beberapa tujuan dan sasaran serta indikator yang harus dicapai, beberapa tujuan itu adalah : Penguatan kualitas ketenagakerjaan dengan sasarannya adalah menurunkan angka pengangguran serta indikator kinerjanya adalah tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Adapun tujuan strategis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja ;
2. Meningkatkan kompetensi, kemandirian, daya saing dan produktivitas tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran.
3. Meningkatkan kesempatan dan perluasan kerja;
4. Mewujudkan hubungan industri yang harmonis, berkeadilan dan pelayanan penyelesaian kasus Hubungan Industrial dalam upaya perlindungan tenaga kerja;
5. Meningkatkan Sarana prasarana di Kawasan Transmigrasi
6. Meningkatkan kemandirian, kesejahteraan & kerukunan masyarakat kawasan transmigrasi ;

Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala menetapkan program-program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Penetapan program pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di bawah ini :

1. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
   Program yang mendukung adalah :
   - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
     Dengan Kegiatan sebagai berikut :
     - ✓ Penyusunan Perencanaan tenaga kerja
     - ✓ Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
     - ✓ Pemeliharaan rutin sarana prasarana BLK
     - ✓ Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
     - ✓ Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK)

- ✓ Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja
- ✓ Monitoring evaluasi dan Pelaporan TKA

2. Meningkatkan kompetensi, kemandirian, daya saing dan produktivitas tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran.

   Program yang mendukung adalah :

   - Program Peningkatan Kesempatan Kerja

     Dengan Kegiatan sebagai berikut :

     - ✓ Kerjasama pendidikan dan pelatihan

   - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat menjahit
   - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kejuruan Otomotif bagi pencari Kerja
   - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kejuruan Otomotif bagi pencari Kerja
   - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kejuruan Las bagi pencari kerja
   - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kejuruan Pengolahan Hasil Pertanian

3. Meningkatkan kesempatan dan perluasan kerja;

   Program yang mendukung adalah :

   - Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

     Dengan Kegiatan sebagai berikut :

     - ✓ Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai (padat karya)
     - ✓ Job Fair
     - ✓ Penyuluhan Kesempatan Kerja bagi Siswa SLTA yang baru lulus

4. Mewujudkan hubungan industri yang harmonis, berkeadilan dan pelayanan penyelesaian kasus Hubungan Industrial dalam upaya perlindungan tenaga kerja;

   Program yang mendukung adalah :

   - Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenaga-kerjaan;

     Dengan Kegiatan sebagai berikut :

     - ✓ Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
     - ✓ Penyelesaian prosedur, pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan)

- ✓ Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tenatang ketenagakerjaan (Sosialisasi SK. Gubernur tentang UMP dan Serikat Pekerja)
- ✓ Pembinaan, Pembentukan dan Pembuatan PK, PP, PKB dan LKS Bipartit
- ✓ Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (kegiatan kerjasama dengan petugas Pengawas Provinsi untuk monitoring keperusahaan).

5. Meningkatkan Prasarana sarana di Kawasan Transmigrasi;
   Program yang mendukung adalah :
   - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
     Dengan Kegiatan sebagai berikut :
     - ✓ Penyediaan dan pengelolaan prasarana sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi (pembuatan sarana air bersih)
6. Meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan kerukunan masyarakat kawasan transmigrasi;
   Program yang mendukung adalah :
   - Program Pengembangan Sumberdaya kawasan Transmigrasi;
     Dengan Kegiatan sebagai berikut :
     - ✓ Peningkatan Sumber Daya warga Transmigrasi
   - Pelatihan budidaya jamur tiram
   - Pembuatan pupuk organik
   - Pengembangan usaha Demplot
7. Mewujudkan kualitas kerja yang efisien dan efektif dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih;
   Program yang mendukung adalah :
   - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
     Dengan Kegiatan sebagai berikut :
     - ✓ Penyediaan jasa surat menyurat
     - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
     - ✓ Penyediaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / Operasional
     - ✓ Penyediaan jasa kebersihan Kantor

- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- ✓ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman
- ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
- ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

  Dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - ✓ Pengadaan Kendaraan dinas / operasional
  - ✓ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - ✓ Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
  - ✓ Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - ✓ Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

  Dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - ✓ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - ✓ Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  Dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - ✓ Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Bimtek, Sosialisasi, Diklat, Pelatihan Bidang Keuangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian)

No	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pelayanan administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Disnakertrans	77.080.000
		2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Disnakertrans	211.800.000
		3. Penyediaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / Operasional	Disnakertrans	6.500.000
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disnakertrans	57.210.000
		5. Penyediaan alat tulis kantor	Kesekretariatan	31.463.780
		6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kesekretariatan Kesekretariatan	31.377.250 25.377.250
		7. Penyediaan Komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kesekretariatan	3.780.000
		8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (utk BLK)	Kesekretariatan	998.710.000
		9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peg. Disnakertrans	4.440.000
		10. Penyediaan makanan dan minuman	Pejabat dan Pegawai	48.910.000
		11. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Peg. Disnakertrans	93.400.000
		12. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah	Peg. Disnakertrans	15.400.000
				Rp.1.605.448.280
2	Peningkatan Sarana dan	1. Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional	Peg. Disnakertrans	94.550.000
		2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Disnakertrans	616.650.000
		3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor	89.150.000
		4. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinakertrans	54.250.000
		5. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Peralatan Disnakertrans	16.700.000
				Rp. 871.300.000
3	Peningkatan Pengembangan sistem capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Disnakertrans	6.500.000
		2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disnakertrans	4.500.000
				Rp. 11.000.000

No	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	Peg. Disnakertrans	51.270.000 **Rp. 51.270.000**
5	Peningkatan Promosi & kerja-sama investasi	1. Penyelenggaraan pameran Investasi / promosi Daerah	Disnakertrans	15.000.000 **Rp. 15.000.000**
6	Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	1. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja 2. Penyebarluasan informasi bursa Tenaga Kerja 3. Pemeliharaan rutin Sarana dan Prasarana BLK 4. Rehabilitasi Sedang/berat sarana dan prasarana BLK 5. Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) 6. Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja 7. Monitoring evaluasi &pelaporan Kegiatan	Disnakertrans Pencari Kerja Gedung BLK Gedung BLK Gedung BLK Calon TKI TKA	200.000.000 65.000.000 50.000.000 2.954.000.000 1.072.000.000 93.000.000 60.000.000 **Rp.4.494.000.000**
7	Peningkatan Kesempatan kerja	1. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Menjahit, Otomotif, Las dan Pengolahan hasil pertanian 2. Penyiapan Tenaga Kerja siap Pakai (padat karya & penyuluhan kesempatan kerja siswa SLTA baru lulus).	Tenaga Kerja Tenaga Kerja Masyarakat dan Siswa SLTA	400.000.000 195.000.000 **Rp. 595.000.000**
8	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan Industrial 2. Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jaminan sosial ketenagakerjaan 3. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja	16.750.000 16.800.000 60.000.000 133.400.000 **Rp. 226.950.000**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
9	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1. Penyediaan dan pengelolaan prasarana sarana sosial dan ekonomi di kawasan Transmigrasi (pembuatan Sarana Air Bersih)	Kawasan Transmigrasi	292.553.450 **Rp. 292.553.450**
10	Pengembangan Sumberdaya Kawasan Trans-migrasi	1. Peningkatan Sumber Daya Warga Transmigrasi - Pelatihan budidaya jamur Tiram - Pembuatan Pupuk organik - Pengembangan Demplot	Masyarakat Kawasan Transmigrasi	231.715.000 **Rp. 231.715.000**
		J U M L A H	-	**Rp.8.394.236.730**

BAB IV
P E N U T U P

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala. Rencana Kerja tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan.

Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berbagai hambatan dan kendala, harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan lebih optimal, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 menetapkan indikator capaian kinerja adalah "Tingkat Pengangguran Terbuka 1,99%" atau dibawah rata-rata nasional atau tingkat pengangguran alami.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2019 disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di bidang Ketenagakerjaan, serta mampu menyajikan kinerja yang lebih optimal.

Marabahan, Juni 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Barito Kuala,

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.Si
NIP. 19630724 198903 1 009